

## MAU DIBAWA KEMANA PENDIDIKAN NASIONAL KITA

Oleh: Badrun Fawaidi

### Abstrak:

Amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ujian Nasional (UN) bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional didorong untuk membangun pola pendidikan yang mementingkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun faktanya, pendidikan nasional belum menghasilkan lulusan berkualitas tinggi, kecuali mereka yang mau *berjibaku* dalam mencerdaskan dan mencerahkan dirinya sendiri. UN hanya mendorong sistem pendidikan nasional mandul dan tumpul untuk mengasah kepekaan siswa pada nilai terutama nilai agama. Dengan demikian, perlu secara konsisten untuk melakukan pembenahan, penataan, dan peningkatan sistem pendidikan nasional secara makro yang tidak hanya mengembangkan satu dimensi (kognitif *an sich*).

Kata Kunci: Pendidikan, Nilai, dan UN

### Pendahuluan

Berdasarkan amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ujian Nasional (UN) bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional. Dibalik amanah UU ini ada hal yang cukup menarik untuk di lihat dan diperbincangkan. Semenjak Muhadjir Effendy (Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)) dinobatkan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla muncul isu moratorium Ujian Nasional (UN). Isu ini menjadi penyulut pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga ketika mutu pendidikan nasional untuk jenjang SMP dan SMA tengah mengalami penurunan yang masif. Pada 2014, nilai rata-rata UN 65,2 untuk jenjang SMP dan 61,2 untuk jenjang SMA. Pada 2015, nilai rata-ratanya adalah 61,81 untuk jenjang SMP dan 61,93 untuk jenjang SMA. Tahun 2016, nilai rata-rata untuk jenjang SMP 58,61 dan jenjang SMA 55,30 (Kompas, 4 Januari 2017).

Secara berseloroh saya katakan ke teman-teman, seakan-akan carut-marut di dunia pendidikan nasional Indonesia terutama dalam pelaksanaan UN menjadi tradisi yang lazim perlu terjadi. Apalagi ketika UN menjadi penentu kelulusan siswa memunculkan problematika sistemik di semua jenjang pendidikan seperti SMP atau SMA yaitu kecurangan akademik seperti menyontek, jual beli soal atau

joki akademik. Nilai UN yang diprioritaskan harus mampu didongkrak untuk menyamai atau bahkan melebihi standar yang ditetapkan, walaupun ia mengenyampingkan sisi etika yang dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Hal inilah yang mendasari Muhadjir Effendy untuk melakukan moratorium UN yang akhirnya dianulir oleh Presiden Djoko Widodo dengan tetap menyelenggarakan UN sebagai parameter kelulusan.

Implikasinya, sistem pendidikan nasional didorong untuk membangun pola pendidikan yang mementingkan kemampuan kognitif. Siswa pun diharapkan memunculkan performa tinggi dengan capaian nilai yang sesuai standar. Lambat laun sistem pendidikan nasional membingkai dirinya pada dua persoalan mendasar, yaitu: *pertama*, ia lebih memprioritaskan satu standar (standar kompetensi lulusan) diantara delapan standar pendidikan (standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan terakhir standar kompetensi lulusan). UN pada konteks ini, sebenarnya, medium untuk melakukan evaluasi pendidikan nasional, bukan sebagai penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional.

*Kedua*, pendidikan nasional melihat siswa hanya pada satu sisi saja yaitu sisi kognitifnya sebagai tolok ukur kelulusannya, sedangkan sisi lain yaitu afektif dan psikomotor tidak terlalu dipentingkan. Artinya, UN tidak melihat siswa secara holistik, sebab ia tidak mencerminkan performa siswa selama bertahun-tahun di jenjang pendidikan tertentu. Tiga tahun ditentukan oleh tiga atau empat hari pelaksanaan UN, sehingga ada oknum-oknum yang mendewakan nilai UN menggadaikan sisi moralitas dan mengagungkan sisi individualisme kompetitif.

### **Hakikat Pendidikan**

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi sepanjang hayat agar dapat berkembang sejalan dengan aspirasi dan konsep pandangan hidup. Untuk memajukan kehidupan manusia, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan pandangan-pandangan teoretikal dan praktikal sepanjang waktu.

Pendidikan adalah satu sistem pengubahan sikap serta perilaku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran. Dengan demikian, pembelajaran difokuskan pada tujuan yang hendak dicapai (Hasyim, 2015:94). Maka setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada peserta didik tertuju kepada pendewasaan, agar cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik (Mortimer, 1962:209).

Ada pula kalangan yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan satu usaha yang dengan sengaja diambil untuk memengaruhi serta menunjang anak yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan, jasmani serta akhlak hingga perlahan-lahan dapat mengantarkan anak pada tujuan serta cita-citanya yang tertinggi. Supaya mendapatkan kehidupan yang bahagia serta apa yang dikerjakannya bisa berguna untuk dirinya, masyarakat, bangsa, negara serta agamanya” (Suwendi, 2005:1).

Pendidikan dikatakan pula sebagai wahana proses pematangan manusia (Tafsir, 2008:33). Dengan demikian, kehadiran pendidikan sebagai wahana dalam proses pematangan manusia ini sudah diterima sepanjang sejarah manusia ber peradaban (Danim, 2003:17). Secara fitrah, manusia mampu memilih dan memilah pada hal yang baik atau buruk, benar atau salah, serta mampu meletakkan fondasi hak-hak asasi manusia (HAM) dan mewujudkannya secara total, membebaskan manusia dari penindasan social dan natural dari manusia lain.

Pendidikan sebagai proses pematangan kualitas hidup manusia agar mereka dapat memahami apa arti dan hakikat hidup (Mulyasana, 2011:2). Pendidikan mengarah pada pengembangan kepribadian manusia secara integral. Kepribadian sebagai dasar pembentukan tatanan social, politik, ekonomi, keamanan dan kenyamanan suatu masyarakat. Masyarakat merupakan wadah dari pengembangan peradaban, maka berbarengan dengan pembinaan masyarakat itu diletakkan dasar-dasar karakter, sehingga terwujud sebuah masyarakat Islam yang kokoh dan kuat. Fokus dan tujuan utama pendidikan adalah untuk menghasilkan

manusia dewasa secara intelektual, emosional, dan spiritual (Mulyana, 2011:106). Kedewasaan manusia teraktualisasikan sebagai bentuk tanggung jawab memikul kewajiban bersama dalam menjaga dan melestarikan keamanan, kenyamanan manusia dan lingkungan, terlepas dari faktor subyektif, seperti agama, suku, ras, budaya, golongan dan lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, pada Bab I pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang meliputi wewenang mengembangkan, mengelola dan melaksanakan pendidikan. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan sebagai penyelenggara pendidikan, memproyeksikan terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Program kerja pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan kebijakan yang strategis, dimana pendidikan sebagai pilar utama pembangunan peradaban bangsa, dan merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa, terutama bangsa yang sedang berkembang. Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan melalui pendidikan. Stabilitas perkembangan peradaban manusia dalam suatu bangsa atau Negara dapat diukur melalui tingkat kematangan kualitas sumber daya manusia.

Mengingat pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga yaitu orang tua sebagai pendidik di dalam keluarga dan guru di lingkungan sekolah, maka dalam konteks pendidikan formal, satuan pendidikan (sekolah) merupakan unit terkecil dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu tanggung jawab sekolah adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Sekolah mampu mengolah peserta didik yang diilustrasikan sebagai barang mentah menjadi barang jadi yang bernilai tinggi. Produk sekolah mampu melahirkan tamatan yang siap memasuki masyarakat baik secara fisik material maupun mental spiritual. Pada

sisi material, siap memasuki dunia kerja kelas terampil atau mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pada sisi spiritual dapat menjadi warga yang saleh di masyarakat, tidak menjadi penyakit masyarakat, beban orang tua, masyarakat maupun Negara. Kualitas hasil pendidikan tercermin dalam kehidupan masyarakat yang semakin harmoni, sejahtera dan memiliki daya saing tinggi dalam segala dimensi kehidupan pada tingkat local, regional maupun global. Keberhasilan suatu sekolah setidaknya ditentukan oleh terpenuhinya delapan standar pendidikan, dan salah satunya yang berperan penting adalah pendidik dan tenaga kependidikan.

### **Pendidikan Nilai dan UN**

Dua persoalan tersebut memiliki implikasi yang kuat terhadap pola pembentukan generasi bangsa. Apalagi saat ini sekolah yang ingin menyelenggarakan UN terutama UNBK yang telah mendaftarkan 12.023 unit dari total 97.645 unit dari yang siap melaksanakan UNBK (jenjang SMP 3.216 unit (5,35%) dari total 60.063 unit; SMA 3.539 unit (13,79%) dari total 25.663; dan SMK 5.268 (44,19%) dari total 11.919 unit) (Jawa Pos, 6 Januari 2017). Dengan demikian, siswa yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut ditempa dan dibentuk untuk menjadi pilar penyanggah pembangunan negara. Kenyataannya, sebagaimana yang disinyalir oleh Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya, *Islam dalam bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (2015:67), pendidikan nasional belum menghasilkan lulusan berkualitas tinggi, kecuali mereka yang mau *berjibaku* dalam mencerdaskan dan mencerahkan dirinya sendiri.

Sikap tersebut mendorong lahirnya sikap individualis yang egosentris, ketamakan, dan apatis terhadap lingkungan masyarakat. Tragisnya, gaya hidup individualisme yang menekankan pada kepentingan pribadi nantinya melahirkan keegoisan yang harus diakui dan dihargai keberadaannya. Thomas Lickona dalam bukunya, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (1991) mengkhawatirkan dampak dari ketergelinciran moral terhadap diri mereka sendiri, orang lain maupun terhadap masyarakat secara luas. Salah satu dampak yang terlihat nyata dan tiap tahun terjadi dalam pelaksanaan

UN adalah penurunan moralitas pelaku pendidikan mulai dari siswa, guru maupun pihak-pihak lain (menyontek atau jual beli soal dan korupsi dana percetakan soal).

Hal itu terjadi dikarenakan proses pendidikan yang siswa terima lepas dari internalisasi nilai terutama nilai agama (keimanan). Mereka menginternalisasikan pengetahuan dan keterampilan dalam diri mereka melalui proses pendidikan yang menekankan pada dimensi kognitif saja. Dikuatkan lagi dengan sistem evaluasi pendidikan yang mengharuskan siswa untuk mendapatkan nilai ujian (nilai UN) sesuai standar. Konsekuensinya, antara proses pendidikan yang timpang dan tekanan sistem UN menumbuhkan akumulasi pengalaman siswa yang lepas dari nilai. Orientasi kehidupan siswa cenderung pada nilai ekonomis dan teknologis semata yang hanya mencerdaskan otak dan membekukan hati.

Lazim berbagai perilaku siswa yang tidak mencerminkan nilai seperti sikap serakah yang cenderung membawa kerusakan kehidupan mereka. Lepasnya nilai dalam diri siswa berlangsung secara sistematis seperti proses pendidikan yang timpang dan juga masif seperti pada pelaksanaan UN, hanya menghasilkan siswa yang mudah terbawa arus non-fitri. Orientasi hidup mereka lebih ditekankan pada angka-angka, bukan pada keagungan kualitas hidup mereka dan hakikat diri mereka sebagai makhluk berketuhanan.

Fenomena keterberangusan nilai dalam diri manusia sebagai makhluk keberketuhanan dan sosial telah tampak nyata di peradaban Barat. Friedrich Nietzsche memproklamirkan “Tuhan telah mati, *gott ist tot*” dan dalam buku lainnya *The Madman*, ia menulis “Tidakkah seharusnya kita sendiri menjadi Tuhan-Tuhan?”. Friedrich Hegel menyatakan hal yang senada bahwa “Bagi suatu bentuk pengalaman, Tuhan sudah mati”; atau Heinrich Heine yang secara lugas mengatakan “Tuhan yang sedang sekarat”. Pernyataan-pernyataan ini merupakan puncak ateisme pada abad ke-14 di Barat dan melahirkan teotanalogi serta merembes pada gerakan anti-agama (agnostisme). Namun bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pancasila sila pertama “Ketuhanan yang maha Esa” dan sila ketiga “Persatuan Indonesia” merupakan bangsa yang beragama. Pilar ini menunjukkan tata kehidupan bangsa Indonesia yang berketuhanan (beragama) dalam keragaman.

Pendidikan nilai pada saat sekarang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk diterapkan dalam pendidikan nasional kita. Pendidikan nilai berperan penting

dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan yang maha Esa sebagaimana amanah Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Renstra Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Karena pendidikan merupakan institusi pembentuk siswa yang utuh, maka pembinaan nilai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan menjadi sarana ampuh untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif. Salah satu contoh adalah bagaimana siswa mampu berselancar di dunia maya (yang menyediakan beragam menu) dengan etika sebagaimana layaknya di dunia nyata.

Pemerintah memang perlu meninjau ulang pelaksanaan UN yang akan dilaksanakan dengan berbasis komputer (UNBK). Pemerintah, sebagaimana yang dikatakan Muhadjir Effendy setelah rapat kabinet di Istana Bogor (4 Januari 2017) menargetkan pelaksanaan UNBK ini 80% untuk jenjang SMA/SMK dan 30% SMP. Namun mereka perlu secara konsisten untuk melakukan pembenahan, penataan, dan peningkatan sistem pendidikan nasional secara makro yang tidak hanya mengembangkan satu dimensi (kognitif *an sich*). Namun, pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan yang mampu membangun dan meningkatkan semua dimensi siswa berbasis nilai. Siswa diharapkan mampu mengembangkan dirinya pada dimensi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya dengan landasan nilai kebertuhanan (dalam Islam diistilahkan *al-Ihsan*). Dalam bahasa Abuddin Nata (2016:136), tujuan pendidikan perlu diselaraskan dengan sifat dasar manusia untuk menjadi manusia yang baik.

Faktualnya, UN hanya mendorong sistem pendidikan nasional mandul dan tumpul untuk mengasah kepekaan siswa pada nilai terutama nilai agama. Bahkan pelaksanaan UN yang tidak berbasis komputer maupun yang UNBK masih memunculkan banyak persoalan seperti kemerosotan moral atau ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan. Bahkan pada saat ini porsi yang dilakukan oleh subjek pendidikan adalah dengan menaikkan nilai rapor agar siswanya nanti lulus. Sudah selayaknya pemerintah untuk meninjau ulang sistem pendidikan nasional menjadi sistem pendidikan holistik, dinamis, dan progresif yang mengedepankan keutuhan kemanusiaan siswa. Di satu sisi pemerintah juga perlu menggalakkan adanya program penelitian indeks integritas siswa dan sekolah untuk mengukur kualitas pendidikan nasional secara makro.

## Penutup

Pendidikan pada kerangka ini merupakan proses pemanusiaan manusia yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kemanusiaan manusia. Sudah selayaknya apabila pendidikan nasional kita untuk tidak mengembangkan salah satu potensi kemanusiaan manusia, tetapi ia secara konsisten, masif, dan sistematis untuk mengembangkan seluruh potensi tersebut.

## Daftar Pustaka

- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Harian Jawa Pos, 6 Januari 2017.
- Harian Kompas, 4 Januari 2017.
- Hasyim, Farid. *Kurikulum Pendidikan Islam: Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif Antara KTSP dan Kurikulum 2013*. Malang: Madani. 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan. 2015.
- Mulyana, Rohmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Mulyasana, Deddy. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Suwendi. *Konsep Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari*. Jakarta: LeKDis. 2005.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Pendidikan Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.